
PENGEMBANGAN KESADARAN KRITIS DALAM PEMBELAJARAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMIMPIN VISIONER

by
Haryanto^{*)}

Abstract

The visioner leader in this world obviously formed from nature selection by itself. The public figures like Soekarno, Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara, Nelson Mandela, Napoleon, Rabindranat Tagore and another public figures had never got any leadership educations. The formation of the visioner leaders in the past, mostly formed because of obstinate mind. The question is, is there any chance of forming the visioner leaders without obstinate mind and another luckiness? Can the education create those incredible visioner leader?

Education should become the determinative variable for another variable like culture, politics, economy even religion. This kind of understanding, seems different with what we used to understand before, however education actually influenced by those factors such as culture, politics, economy and religion. This is happen because our educational practices is also influenced especially by economic and political factors. The education developing system is not applied to create a fair economical system which support the poor yet. The education nowadays, still loaded by the government holders importance. Because of that, we should create critical awareness through education so that education could provide the visioner leader, so hopefully, they could create fair economic system which support the poor. In order to create those effort, we should abandon the conservative and liberal paradigms into critical paradigm education. This kind of paradigm is an effort to build and change the society awareness from magical and naive awareness into critical awareness. With this kind of education, I believed that it could create the visioner leaders who can bring the change for the better of this nation.

Key Words: Critical awareness

PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan faktor penting, strategis dan determinatif bagi masyarakat. Maju-mundurnya kualitas peradaban suatu masyarakat/bangsa sangat bergantung pada bagaimana kualitas pembelajaran diselenggarakan oleh sekolah. Sejarah membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang menyadari dan memahami makna strategisnya pembelajaranlah yang mampu meraih kemajuan dan menguasai dunia. Bagaimana pun, pembelajaran merupakan alat terefektif bagi perubahan dan pencapaian kemajuan dalam berbagai dimensi kehidupan.

Dilihat dari perspektif kebudayaan, pembelajaran merupakan upaya sivilisasi, enkulturisasi. Dari perspektif politik, pembelajaran dipandang sebagai langkah untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) warga yang taat aturan, beradab, bertanggung jawab, dan memahami hak dan kewajiban secara proporsional. Kemudian secara ekonomi, adalah jelas bahwa pembelajaran merupakan "*human capital investment*". Pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang dibentuk melalui proses pembelajaran berkorelasi positif bagi peningkatan penghasilan dan kesejahteraan. Karena itulah, perspektif ekonomi meyakini bahwa hanya lewat upaya pembelajaran, kesejahteraan ekonomi dapat dibangun. Kemudian dari perspektif filosofis, bahwa pembelajaran merupakan upaya humanisasi yang sesungguhnya. Melalui pembelajaran maka manusia dibentuk, dikonstruksikan dan diarahkan agar menjadi manusia sesungguhnya (*humanized human being*), makhluk rasional yang memiliki dan memahami nilai humanitas yang berlaku secara universal. Demikian pula, dari perspektif agama, pembelajaran ditempatkan pada posisi tertinggi karena fungsinya yang membentuk perilaku teratur sesuai ajaran Tuhan yang diimaninya.

Menyadari penting dan strategisnya pembelajaran dan atau pendidikan dalam proses dinamika kehidupan manusia, maka para pendiri bangsa kita, telah memberikan perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pembangunan pendidikan nasional. Para *founding fathers* bangsa memandang bahwa melalui upaya pendidikan,

^{*)} Dosen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY

bangsa kita akan dapat melakukan perubahan ke arah kemajuan. Sikap tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang mempertegas tujuan pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahkan UUD 1945 menyatakan bahwa; 1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, 2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai, serta 3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pertanyaannya adalah pembelajaran seperti apa yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa? Praksis pembelajaran bagaimana yang mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta mampu *menghasilkan pemimpin visioner*? Tidak terlalu mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi kajian tentang paradigma pembelajaran sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran barangkali menjadi salah satu solusi untuk menuju praksis pembelajaran yang mampu menghasilkan pemimpin visioner.

PROBLEMATIKA MODERNITAS

Secara positif perkembangan global sedikitnya dapat dicirikan ke dalam lima hal (Harahap, 1998). *Pertama*, terjadinya pergeseran dari konflik ideologi dan politik ke arah persaingan perdagangan, investasi, dan informasi; dari keseimbangan kekuatan (*balance of power*) ke arah keseimbangan kepentingan (*balance of interest*). *Kedua*, hubungan antarnegara-bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan (*dependency*) ke arah saling bergantung (*interdependency*); hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat bergantung kepada posisi tawar-menawar (*bargaining position*). *Ketiga*, batas-batas geografis hampir tidak lagi menjadi sesuatu yang berarti secara operasional. Kekuatan suatu negara dan komunitas di dalam interaksinya dengan negara dan komunitas lain lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). *Keempat*, persaingan antarnegara lebih diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi. Sehingga setiap negara berkepentingan untuk mendongkrak anggaran dan penyediaan dana yang besar bagi penelitian dan pengembangan bila tidak ingin tertinggal dengan negara lain. *Kelima*, terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, dan tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi dianggap tidak menguntungkan.

Sebaliknya, implikasi negatif perkembangan global memunculkan pribadi-pribadi yang miskin spiritual, menjatuhkan manusia dari makhluk spiritual ke lembah material-individualistik; eksistensi Tuhan hanya berdiam di relung pemikiran, diskusi, khutbah-khutbah baik lisan maupun tulisan; dan mengalami frustrasi eksistensial (*existential frustration*) dengan ciri-ciri; hasrat yang berlebihan untuk berkuasa (*the will to power*), bersenang-senang mencari kenikmatan (*the will to pleasure*) dengan uang-kerja-seks, dan perasaan hidup tanpa makna, seperti bosan, apatis, dan tak punya tujuan. Ikatan primordial dengan sistem politik modern cenderung melahirkan nepotisme, birokratisme, dan otoriterisme baru yang akhirnya jatuh kepada krisis multidimensi yang tak kunjung usai sebagaimana melanda Indonesia dewasa ini. Seperti dikatakan Seyyed Hossein Nasr (1975) dalam bukunya *Islam and the Plight of Modern Man*, bahwa manusia modern cenderung mengalami *split personality* dan *split integrity* karena modernisasi global. Lebih dari itu, peran agama digeser menjadi persoalan akhirat yang tidak memiliki keterpautan dengan perkembangan global dan orientasi serta pembangunan masa depan.

Tidak kalah memprihatinkan, di bidang pembelajaran pun mengalami disorientasi sebagai akibat dari pengaruh global. Pembelajaran dikembangkan atas dasar pemikiran positivisme seperti obyektivitas, empiris, tidak memihak pada pemelajar, berjarak dengan obyek belajar (*detachment*), rasional dan bebas nilai. Yang demikian itu justru menghambat proses pembebasan dan menghilangkan watak dan menumpas benih-benih emansipatoris pada setiap proses pembelajaran. Penyelenggaraan pembelajaran pada perspektif positivistik merupakan proses fabrikasi dan mekanisasi pembelajaran untuk memproduksi keluaran pembelajaran yang harus sesuai dengan 'pasar kerja'. Proses pembelajaran yang diselenggarakan juga tidak toleran terhadap segala bentuk '*non positivistic ways of knowing*' yang disebut sebagai tidak ilmiah. Pembelajaran menjadi a-historis, yakni mengelaborasi model masyarakat dengan mengisolasi banyak variabel dalam model tersebut. Pemelajar harus tunduk pada struktur yang ada dan mencari cara-cara dimana peran, norma, dan nilai-nilai yang dapat diintegrasikan dalam rangka melanggengkan sistem tersebut. Asumsi yang melandasi pembelajaran itu adalah

bahwa tidak ada masalah dalam sistem yang ada. Masalahnya terletak pada sikap mental, pengetahuan dan keterampilan pemelajar belaka, termasuk kreativitas, motivasi, keahlian teknis pemelajar. Oleh karena itu dalam perspektif positivisme, pembelajaran lebih dimaksudkan untuk mengembangkan kecerdasan, keterampilan, dan keahlian pemelajar, sementara komitmen, keyakinan, kesadaran terhadap sistem yang lebih adil dan motivasi untuk menantang struktur sosial yang ada tidak dilakukan, namun lebih sibuk memfokuskan pada bagaimana membuat sistem yang ada itu dapat bekerja.

Proses pembelajaran tidak dilakukan atas dasar analisis struktural tentang lokasi pemihakan. Tanpa visi dan pemihakan yang jelas terhadap siapa, pembelajaran sulit diharapkan menjadi institusi kritis untuk pembebasan dan perubahan sosial. Pembelajaran juga perlu melakukan identifikasi isu strategis dan menetapkan visi dan mandat mereka sebagai pembelajaran untuk pemberdayaan. Tanpa pemihakan, visi, analisis dan mandat yang jelas, pembelajaran tanpa disadari telah menjadi bagian dari *'status quo'* dan ikut melanggengkan ketidakadilan. Bahkan tanpa pemihakan yang jelas, pembelajaran hanyalah menjadi alat penjinakan atau alat hegemoni dari sistem dan ideologi kelompok tertentu.

Sementara itu ada pandangan yang kuat dari pendidik radikal, bahwa pembelajaran pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik ataupun terbebas demi melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pembelajaran tidak lebih sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti sistem relasi kelas, relasi gender, relasi rasisme ataupun sistem relasi lainnya. Pandangan semacam ini dikenal dengan teori *'reproduksi'* dalam pembelajaran. Disisi lain ada pandangan lain yang berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa pembelajaran adalah proses *'produksi'* kesadaran kritis, seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender, maupun kesadaran kritis lainnya. Pandangan ini menganggap bahwa pembelajaran merupakan proses membebaskan manusia. Pendirian kelompok ini berangkat dari asumsi, bahwa manusia dalam sistem dan struktur sosial yang ada pada dasarnya mengalami proses dehumanisasi karena eksploitasi kelas, dominasi gender maupun karena hegemoni dan dominasi budaya lainnya. Oleh sebab itu pembelajaran harus mampu menjadi sarana untuk *'memproduksi'* kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan manusia, dan dalam kaitan ini, pembelajaran berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai upaya untuk menghasilkan pemimpin visioner.

PEMIMPIN VISIONER

Penulis dan orang-orang yang mempelajari kepemimpinan sering tidak sependapat mengenai apa yang diperlukan bagi suatu pembentukan pemimpin visioner. Akan tetapi mereka umumnya sependapat bahwa para pemimpin visioner setidaknya harus cerdas dan kritis. Kecerdasan dan daya kritis pemimpin visioner diperlukan untuk; 1) memberi respon yang fleksibel terhadap situasi, dan 2) menghasilkan gagasan-gagasan yang baru.

Pemimpin visioner membutuhkan kreativitas, intuisi, pertimbangan subyektif atau kebijaksanaan yang istimewa. Kemampuan dasar tersebut hanya terdapat pada orang-orang yang cerdas dan kritis.

Pemimpin visioner sangat diperlukan bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak terkecuali pada bidang pendidikan memerlukan pemimpin visioner yang memiliki gagasan-gagasan baru untuk melakukan perubahan. Jika bidang pendidikan tidak memiliki pemimpin visioner di semua level, maka dapat diduga bahwa pendidikan tidak akan memberi dampak apa-apa terhadap perubahan peradaban suatu bangsa. Bahkan secara ekstrim Nanus (1992) dalam bukunya yang berjudul *Visionary Leadership* mengatakan bahwa kurangnya pemimpin visioner di Amerika Serikat menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Pemimpin visioner memiliki empat peran penting yaitu sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Penentu arah yang baik harus dapat menyusun berbagai langkah menuju sasaran yang dapat diterima sebagai suatu kemajuan riil oleh semua orang di dalam organisasi. Agen perubahan yang baik harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan di dunia luar, memperkirakan implikasi terhadap organisasi, dan menciptakan *sense of urgency*. Pelatih yang baik, harus mampu member tahu orang lain dimana tempat berpijak, apa arti visi, dan apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi.

Syarat pemimpin visioner (cerdas dan kritis) dan empat peran pemimpin visioner (penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih) tentu dapat dipersiapkan melalui proses pembelajaran yang sengaja didisain untuk menghasilkan pemimpin visioner. Pertanyaannya, model pembelajaran seperti apa yang mampu menghasilkan pemimpin visioner?

PARADIGMA KONSERVATIF

Bagi kaum konservatif, ketidaksejajaran masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi mereka bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia menjadi lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang klasik atau awal paradigma konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna di balik itu semua. Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif lama tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mengubah kondisi mereka.

Namun pada perjalanan selanjutnya, paradigma konservatif cenderung lebih menyalahkan subyeknya. Bagi kaum konservatif, mereka yang menderita, yakni orang-orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjarakan, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena banyak orang lain yang ternyata dapat bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang ke sekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak dipenjarakan. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Kaum konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindari konflik dan kontradiksi.

PARADIGMA LIBERAL

Kaum liberal, berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat tetapi bagi mereka pembelajaran tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu tugas pembelajaran juga tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik dan ekonomi. Sungguhpun demikian, kaum liberal selalu berusaha untuk menyesuaikan pembelajaran dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pembelajaran, dengan jalan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam pembelajaran dengan usaha reformasi ‘kosmetik’. Umumnya yang dilakukan adalah seperti; perlunya membangun kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah dengan pengadaan komputer yang lebih canggih dan laboratorium, serta berbagai usaha untuk menyehatkan rasio guru-murid. Selain itu juga berbagai investasi untuk meningkatkan metodologi pembelajaran dan pelatihan yang lebih efisien dan partisipatif, seperti *Quantum Learning*, *Learning by Doing*, *Contextual Learning*. Usaha peningkatan tersebut terisolasi dengan sistem dan struktur ketidakadilan kelas dan gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat.

Kaum liberal dan konservatif sama-sama berpendirian bahwa pembelajaran adalah a-politik, dan ‘excellence’ haruslah merupakan target utama pembelajaran. Kaum liberal beranggapan bahwa masalah masyarakat dan pembelajaran adalah dua hal yang berbeda. Mereka tidak melihat kaitan pembelajaran dalam struktur kelas dan dominasi politik dan budaya serta diskriminasi gender di masyarakat luas. Bahkan pembelajaran bagi salah satu aliran liberal yakni *structural functionalisme* justru dimaksud sebagai sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat. Pembelajaran justru dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik.

Pendekatan liberal inilah yang mendominasi segenap pemikiran tentang pembelajaran baik pembelajaran formal seperti sekolah, maupun pembelajaran non-formal seperti berbagai macam pelatihan. Akar dari pembelajaran ini adalah Liberalisme, yakni suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan, serta mengidentifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskriptif demi menjaga stabilitas jangka panjang. Konsep pembelajaran dalam tradisi liberal berakar pada cita-cita barat tentang individualisme. Ide politik liberalisme sejarahnya berkaitan erat dengan bangkitnya kelas menengah yang diuntungkan oleh kapitalisme. Paradigma ini dipengaruhi oleh filsafat barat tentang model manusia universal yakni model manusia Amerika dan Eropa. Model tipe ideal mereka adalah manusia ‘*rationalis liberal*’, seperti; **pertama** bahwa semua manusia memiliki potensi sama dalam intelektual, **kedua** baik tatanan alam maupun norma sosial dapat ditangkap oleh akal, **ketiga** adalah ‘*individualis*’ yakni adanya anggapan bahwa manusia adalah *otomistic* dan otonom (Bay, 1988). Menempatkan individu secara *otomistic*, membawa pada keyakinan bahwa hubungan sosial sebagai kebetulan, dan masyarakat dianggap tidak stabil karena interest anggotanya yang tidak stabil.

Pengaruh liberal ini kelihatan dalam pembelajaran yang mengutamakan prestasi melalui proses persaingan antar siswa. Perangkingan untuk menentukan siswa terbaik, adalah implikasi dari paham pembelajaran ini. Pengaruh pembelajaran liberal juga dapat dilihat dalam berbagai pendekatan ‘*andragogy*’ seperti dalam *training management*, dan kewirausahaan. *Achievement motivation training* (AMT) yang diciptakan oleh David McClelland adalah contoh terbaik pendekatan liberal. McClelland berpendapat bahwa akar masalah keterbelakangan dunia ketiga karena mereka tidak memiliki apa yang dinamakan “N Ach”. Oleh karena itu syarat pembangunan bagi rakyat dunia ketiga adalah perlu virus “N Ach” yang membuat individu menjadi agresif dan rasional (McClelland).

PARADIGMA KRITIS/RADIKAL

Pembelajaran bagi mereka merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi konservatif pembelajaran bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik, ekonomi masyarakat di mana pembelajaran berada (Giroux, 1981). Bagi mereka kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pembelajaran. Paham ini bertentangan dengan pandangan kaum liberal dimana pembelajaran dianggap terlepas dari persoalan kelas dan gender yang ada dalam masyarakat.

Dalam perspektif kritis, urusan pembelajaran adalah melakukan refleksi kritis terhadap, ‘*the dominant ideology*’ ke arah transformasi sosial. Tugas utama pembelajaran adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Pembelajaran tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, bersikap obyektif maupun berjarak dengan masyarakat (*detachment*) seperti anjuran positivisme. Visi pembelajaran adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk mencipta sistem sosial baru dan lebih adil. Dalam perspektif kritis, pembelajaran harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama pembelajaran adalah ‘memanusiakan’ kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil.

Banyak ahli pembelajaran yang beranggapan bahwa peletak dasar filosofi paradigma pembelajaran kritis ini adalah Paulo Freire, dan terinspirasi oleh pemikir lain tentang ‘pembebasan’ seperti karya Erich Fromm (*Fear From Freedom* - 1942, *Beyond the Chains of Illusion* – 1962). Begitu juga pemikiran Frantz Fanon (1961) dari Afrika tentang “psikologi bagi kaum tertindas” dalam karyanya yang berjudul *The Wretched of the Earth* juga dianggap sebagai pelopor lahirnya pembelajaran kritis. Tetapi bagi penulis, penggagas pertama tentang paradigma pembelajaran kritis adalah Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantoro) dengan *Pancadarma Taman Siswa*, yang berprinsip bahwa pembelajaran harus menyangkut kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan (M.Numan Somantri, dkk., 1995). Sebab Paulo Freire baru lahir tahun 1912, Fromm gagasannya berkembang tahun 60-an, sementara Fanon juga berkembang tahun 60-an. Ki Hadjar Dewantoro mulai meluncurkan gagasan tentang sistem pembelajaran yang mampu membebaskan dan atau memerdekakan manusia sejak tahun 1913.

BAGAIMANA PROSES PEMBELAJARAN KRITIS

Implementasi pembelajaran kritis tidak terlepas dari upaya untuk membangun dan atau mengubah kesadaran masyarakat dari kesadaran *magis* dan kesadaran *naïf* menuju kesadaran *kritis*. Kesadaran ‘*magis*’ (*magical consciousness*), yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya, masyarakat miskin tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran *magis* lebih melihat faktor di luar manusia (natural maupun supra natural) sebagai penyebab dan ketidakberdayaan. Dalam dunia pembelajaran, jika proses pembelajaran tidak mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah maka proses pembelajaran dalam perspektif Freirean disebut sebagai pembelajaran fatalistik. Proses pembelajaran model ini tidak memberikan kemampuan analitis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Siswa secara dokmatis menerima ‘kebenaran’ dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami ‘makna’ ideology dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Kesadaran ‘*naïf*’ (*naïval consciousness*), lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini masalah etika, kreativitas, ‘*need for achievement*’ sebagai penentu

perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena ‘salah’ masyarakat sendiri, karena mereka malas, tidak memiliki jiwa wirausaha,. Oleh karena itu *man power development* adalah sesuatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Pembelajaran dalam konteks ini juga tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada adalah sudah baik dan benar, merupakan faktor *given* dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas pembelajaran adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar siswa dapat masuk beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut.

Kesadaran ‘*kritis*’ (*critical consciousness*), lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta akibatnya pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pembelajaran, melatih siswa untuk mampu mengidentifikasi ‘ketidakadilan’ dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas pembelajaran dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan keselamatan agar peserta didik terlibat dalam suatu proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Agar mampu membangun kesadaran kritis maka proses pembelajaran, harus mencerdaskan sekaligus bersifat membebaskan pesertanya untuk menjadi pelaku (subyek) utama, bukan sasaran pelaku (obyek), dari proses tersebut. Ciri-ciri pokok dari pembelajaran yang demikian itu adalah;

Belajar dari realitas atau pengalaman: yang dipelajari bukan “ajaran” (teori, pendapat, kesimpulan, wejangan, nasehat, dsb) dari seseorang, tetapi keadaan nyata masyarakat atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Akibatnya, tidak ada otoritas pengetahuan seseorang lebih tinggi dari yang lainnya. Keabsahan pengetahuan seseorang ditentukan oleh pembuktiannya dalam realitas tindakan atau pengalaman langsung, bukan pada retorika atau “kepintaran omong”nya.

Tidak Mengurai: karena itu tak ada “guru” dan tak ada “siswa yang digurui”. Semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran ini adalah “guru sekaligus siswa” pada saat yang bersamaan.

Dialogis: karena tidak ada lagi guru atau siswa, maka proses yang berlangsung bukan lagi proses “mengajar-belajar” yang bersifat satu arah, tetapi proses “komunikasi” dalam berbagai bentuk kegiatan (diskusi kelompok, bermain peran, studi kasus, wawancara, dsb) dan penggunaan media yang lebih memungkinkan terjadinya dialog kritis antar semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Agar tetap pada asas pembelajaran kritis yang menjadi landasan filosofinya, maka panduan proses belajar harus disusun dalam suatu proses yang dikenal sebagai “daur belajar (dari) pengalaman yang distrukturkan” (*structural experience learning cycle*). Proses belajar ini memang sudah teruji sebagai suatu proses belajar yang memenuhi semua tuntutan atau prasarat pembelajaran kritis, terutama karena urutan prosesnya memang memungkinkan bagi tiap individu untuk mencapai pemahaman dan kesadaran atas suatu realitas sosial dengan cara terlibat (partisipasi), secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bagian dari realitas tersebut.

Pengalaman keterlibatan inilah yang memungkinkan setiap individu mampu melakukan;

Rangkai-ulang (Rekonstruksi); yakni mengurai kembali rincian (fakta, unsur-unsur, urutan kejadian, dll) dari realitas tersebut. Pada tahap ini juga bisa disebut proses mengalami; karena proses ini selalu dimulai dengan penggalian pengalaman dengan cara melakukan kegiatan langsung. Dalam proses ini partisipan terlibat dan bertindak dan atau berperilaku mengikuti suatu pola tertentu. Apa yang dilakukan dan dialami adalah mengerjakan, mengamati, melihat dan mengatakan sesuatu. Pengalaman itulah yang pada akhirnya menjadi titik tolak proses belajar selanjutnya.

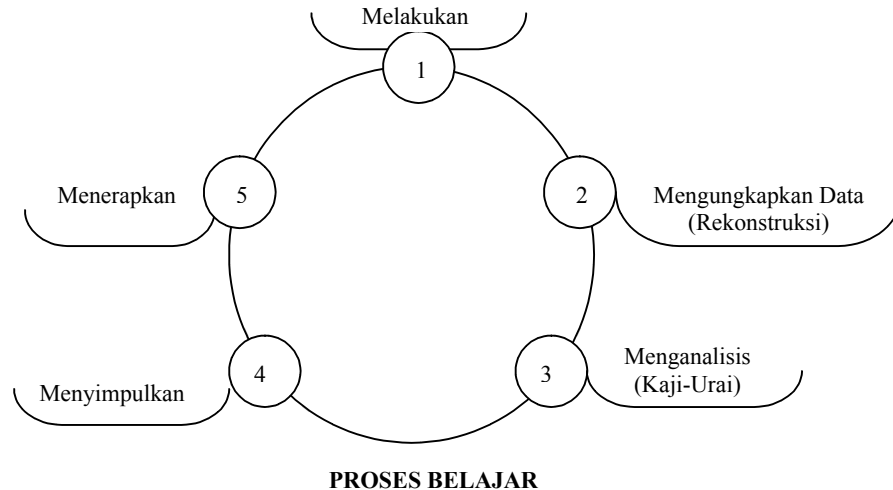
Ungkapan; setelah mengalami, maka tahap berikutnya yang penting yakni proses mengungkapkan dengan cara menyatakan kembali apa yang sudah dialaminya, bagaimana tanggapannya, kesan atas pengalaman tersebut.

Kaji-Urai (Analitis); yakni mengkaji sebab-sebab dan kemajemukan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam realitas tersebut (tatanan, aturan-aturan, sistem yang menjadi akar persoalan).

Kesimpulan; yakni merumuskan makna atau hakekat dari realitas tersebut sebagai suatu pelajaran dan pemahaman atau pengertian baru yang lebih utuh, berupa prinsip-prinsip, generalisasi dari hasil pengkajian

atas pengalaman tersebut. Dengan menyatakan apa yang dialami dan dipelajari melalui cara seperti itu akan membantu untuk merumuskan, merinci dan memperjelas hal-hal yang telah dipelajari.

Tindakan; tahap akhir dari daur belajar ini adalah memutuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru atas realitas tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan realitas-realitas baru yang juga lebih baik. Proses belajar tersebut dapat divisualisasikan melalui gambar berikut;



PENUTUP

Upaya membangun kesadaran kritis melalui pembelajaran, dimaksudkan agar pembelajaran mampu menghasilkan pemimpin visioner. Agar upaya itu terwujud, paradigma pembelajaran *konservatif* dan paradigma pembelajaran *liberal* harus ditinggalkan dan beralih pada paradigma pembelajaran *kritis*. Paradigma pembelajaran kritis ini merupakan sebuah upaya untuk membangun dan mengubah kesadaran masyarakat dari kesadaran *magis* dan kesadaran *naïf* menuju kesadaran *kritis*.

Bagi kaum *konservatif*, ketidakseimbangan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Kaum *liberal*, berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat tetapi bagi mereka pembelajaran tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu tugas pembelajaran juga tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik dan ekonomi. Jika bagi konservatif pembelajaran bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma *kritis* menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik, ekonomi masyarakat di mana pembelajaran berlangsung. Dalam perspektif kritis, urusan pembelajaran adalah melakukan refleksi kritis terhadap, ‘*the dominant ideology*’ ke arah transformasi sosial. Tugas utama pembelajaran adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Burt Nanus, *Visionary leadership* (New York: Joosey-Bass Inc., 1992)
 Erich Fromm, *Fear From Freedom* (New York: Avon Bokks, 1942)
 Erich Fromm, *Beyond the Chains of Illusion* (New York: Routledge & Keegan, 1962).
 Fakih, dkk., *Pembelajaran Populer* (Yogyakarta: REaD Book, 2001).
 Freire, P., *Education for Critical Conciousness* (New York: Continuum, 1981).
 Giroux, H.A., *Ideology, Culture and the Process of Schooling* (Philadelphia: Temple Univ. and Falmer Press, 1981).
 Harahap, Syahrin (ed), *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998).
 Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pembelajaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
 O’neil, Wiliam F., *Educational Ideologies* (California: Goodyear Publising Company, 1981).
 Nasr, Seyyed Hossein, *Islam and the Plight of Modern Man* (London: Logman, 1975).
 Numan Somantri M., dkk., *Pembelajaran dan Prospeknya Terhadap Pembangunan Bangsa dalam PJP II* (Jakarta: ISPI, 1995).